

BAB IV

KEPENTINGAN RUSIA DALAM KONFLIK SEPARATIS GEORGIA ATAS WILAYAH OSSETIA SELATAN DAN ABKHAZIA

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai alasan dibalik keterlibatan Rusia terhadap konflik separatis yang terjadi di Georgia atas wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia, dimana didalam bab ini akan menjelaskan gambaran ekonomi, politik, dari negara Rusia maupun Georgia sehingga dapat memberikan ekplanasi yang tepat mengenai konflik tersebut.

4.1 Tekanan Oleh Duma Terhadap Konflik Georgia

Rusia merupakan negara besar dan berpengaruh di kancan internasional. Tidak kalah dengan Amerika dan negara maju lainnya. Konflik yang terjadi antara Rusia, Georgia, dan Ossetia Selatan ini, memberikan pengaruh yang cukup besar kepada negara-negara lain. Konflik perang yang terjadi diantara ketiga negara tersebut, membuat negara-negara di dunia internasional kena imbasnya. Rusia berusaha untuk menyebarkan dominasi nya terhadap negara-negara lain disekitarnya¹. Kemajuan kekuatan Militer Rusia, dipelopori saat Presiden Vladimir Putin menjabat saat tahun 2000. Pada pemerintahan saat itu, Putin mengutamakan terhadap sektor militer dalam kurun waktu satu dekade. Kemudian Rusia mulai membuat beberapa kebijakan strategis untuk tujuan demi memperbaiki kondisi dalam negeri.

Rusia berusaha untuk meluaskan kembali pengaruhnya pasca perang Dunia II, terutama dalam bidang peningkatan kekuatan militernya yang menjadi sektor paling utama di negara tersebut². Dibalik semua itu, Rusia bahkan masih mempunyai persenjataan nuklir, yang merupakan peninggalan Uni Soviet. Nuklir nuklir tersebut bahkan sekarang sedang mengalami perkembangan. Rusia mempunyai cita-cita untuk menjadi negara superpower

¹ "Berita Rusia", Indonesia.rbth.com, diakses pada tanggal 3 Mei 2016

² "Sejarah lengkap perang Dunia II, www.gurusejarah.com, diakses pada tanggal 1 April 2016

pecahan Uni Soviet. Tujuan utama Rusia ini di terapkan dengan menyebarkan pengaruh, dan merangkul negara-negara di sekitar kawasan Eropa Timur³.

Akan tetapi, tindakan Rusia dalam memberi pengaruh di sekitar kawasan Eropa Timur bukan menjadi pekerjaan mudah. Tujuan utama ini terkendala dengan adanya organisasi Internasional yaitu NATO (North Atlantic Treaty Organization) , dimana NATO merupakan organisasi yang di dominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. NATO merupakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang dibentuk pada tanggal 4 April 1949.

NATO merupakan aliansi militer regional yang mengutamakan dukungan solidaritas diantara para anggotanya tersebut. NATO mempunyai prinsip yaitu, Collective Deffence, dimana ketika anggota NATO tersebut, harus saling membantu anggota NATO lainnya ketika anggota NATO diserang atau mengalami konflik. Negara-negara NATO kemudian membentuk pertahanan bersama. NATO mempunyai 28 negara, diantaranya, negara bekas blok timur seperti (Belgia, Bulgaria, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Denmark, Estonia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Kroasia, Albania, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Dengan adanya invansi NATO terhadap negara-negara disekitar wilayah Rusia, secara politis membuat Rusia terancam. Rusia merasa bahwa NATO menghalanginya untuk menjadi negara yang berpengaruh di kancah Internasional. Intimidasi yang dirasa oleh Rusia akibat NATO ini, mengakibatkan Rusia mengeluarkan kebijakan militer dalam bentuk doktrin militer dengan kebijakan peningkatan kekuatan militer⁴.

Rusia terintimidasi dengan melihat Amerika Serikat dan sekutunya yang sampai sekarang masih berusaha memperebutkan hegemoni dan pengaruhnya di Eropa, Asia, serta negara negara lain di seluruh dunia.

³ "Dituduh Rusia jadi Penyebab Perang Dunia II, Polandia meradang", diakses pada tanggal 10 April 2016

⁴ ibid

Melalui NATO ini, Amerika Serikat berusaha untuk membangun pengaruhnya kembali dan menciptakan susunan baru di Eropa paska terjadinya perang dingin. Amerika Serikat bahkan secara sepihak telah memperbesar dominasi kehadirannya dengan secara sepihak, memperluas cangkupan pasukan NATO, mulai dari Uni Eropa sampai ke wilayah perbatasan Rusia, wilayah pecahan Rusia menjadi salah satunya⁵.

Langkah selanjutnya adalah, Amerika Serikat mendeklarasikan keinginannya dalam merelokasi sejumlah pangkalan militer dari Eropa barat terhadap sejumlah negara Eropa Timur, seperti Bulgaria, Rumania, dan Polandia, bahkan juga telah membangun basis-basis militer di wilayah tersebut.

Dengan memperluas daerah kekuasaannya tersebut, secara tidak langsung Amerika melalui NATO membuat Rusia khawatir, karena tindakan NATO dalam merelokasi serta membangun beberapa pangkalan militer tersebut, memindahkan garis depan sistem pertahanan NATO ke dekat wilayah Rusia.

Jika dilihat dari sejarah dan budaya, hubungan Rusia dengan negara pecahan Rusia sangat erat. Hal ini menyebabkan Rusia berusaha untuk menstabilkan keamanan dan menjaga pengaruh kekuasaannya di sekitar wilayah Rusia, terutama negara pecahan Uni Soviet⁶. Akan tetapi tindakan NATO dalam meluaskan pengaruhnya tersebut, mendominasi wilayah kekuasaan yang dituju Rusia.

Hingga hari ini, NATO masih menjadi kekuatan terbesar yang mendominasi wilayah daratan Eropa dan Internasional. Hal ini tentunya membuat Rusia khawatir. Selama perkembangannya, banyak negara yang bergabung menjadi anggota NATO. Keadaan ini membuat wilayah lingkup NATO semakin membesar, dan mengubah batas-batas ruang lingkup NATO. Kenyataan ini terbukti dengan adanya pangkalan militer yang terus meluas ke wilayah Eropa Timur dan Tengah.

⁵ "Perubahan Ekonomi setelah perang dunia ke II". www.gurusejarah.com, diakses pada tanggal 10 Mei 2016

⁶ "Sejarah Rusia", izwanariq.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 Mei 2016.

Hubungan antara Rusia dengan organisasi internasional ini juga kembali semakin menegang. Terutama dengan isu senjata nuklir, yang berkembang setiap saatnya. NATO yang kuasanya di pegang oleh Amerika Serikat, sebagai pemimpin wilayah di Eropa Timur, dan dulunya merupakan wilayah serta teritori kekuasaan Rusia, membuat Rusia memandang posisi ini sebagai ancaman, terhadap kuasa pengaruhnya.

Amerika Serikat terus melanjutkan rencananya dengan melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan dengan beberapa negara di Eropa Timur, untuk membangun sistem pertahanan misilnya, seperti Polandia, dan Republik Ceko. Kondisi ini membuat Rusia semakin khawatir. Rusia kembali memperluas keamanan militer di setiap perbatasan negaranya. Bergabungnya negara-negara bekas Uni Soviet ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan oleh Rusia. Serta menjadi sebuah ancaman bagi stabilitas keamanan di Eropa Timur.

Perkembangan pengaruh NATO ini mendapatkan reaksi negatif dan kecaman keras oleh Rusia. Rusia berfikir bahwa penyebaran pengaruh ini merupakan sebuah ancaman dan salah satu upaya bagi NATO dalam mempersempit Hegemoni Rusia, khususnya di kawasan Eropa Timur. Pengaruh NATO ini, menjadi salah satu alasan bagi Rusia dalam pengambilan keputusan tindakan atas konflik di Georgia ini. Pengaruh NATO ini memberikan dampak strategis dan politis bagi Rusia, yang akhirnya membuat Rusia bertindak.

Hubungan antara NATO dan Georgia tersebut, membuat Rusia merasa terancam. Awalnya menteri pertahanan NATO di London, menuntut Rusia untuk segera menarik pasukannya dari seluruh daerah Georgia. Sebelumnya, pada tanggal 18 September 2008, 26 negara anggota PAKTA, Pertahanan Atlantik Utara (NATO), mengadakan sidang selama dua hari di London. Pertemuan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mendiskusikan dampak strategis dan politik, akan konflik Rusia dan Georgia.

Perwakilan Rusia, menganggap bahwa perwakilan NATO di Georgia sama saja berusaha untuk menghidupkan kembali perang dingin. Rusia menjadi tersulut, terutama mengetahui bahwa NATO menandatangani kerjasama kembali dengan Georgia. Dengan keadaan tersebut, tentu saja akan semakin membuka peluang Georgia untuk menjadi anggota NATO, dan pengaruh NATO terhadap negara-negara di kawasan eropa timur akan semakin besar, dan ini akan membuat posisi Rusia semakin terjepit.

Sebelumnya menteri pertahanan NATO di London, telah meminta Rusia untuk menarik pasukannya dari seluruh wilayah Georgia. NATO dengan tegas meminta Rusia untuk mau mengakui kedaulatan negara Georgia. NATO mengecam serangan Rusia ke Georgia, dan memerintah secara tegas untuk menarik mundur pasukan Rusia dari teritori wilayah Georgia.

Presiden Rusia Dmitri Medvedev telah jelas menyatakan terhadap koleganya di Prancis Nicolas Sarkozy di telephone bahwa penarikan pasukan akan diadakan pada tanggal 21-22 Agustus⁷. Dengan catatan, bahwa beberapa pasukan yang tersisa akan tinggal di Ossetia Selatan sebagai pasukan penjaga perdamaian serta menjaga perbatasan antara Georgia dengan Ossetia Selatan.

NATO juga tidak kalah cepat dalam bertindak, NATO mengutus kapal perangnya, ke laut hitam guna mendukung Georgia. Pengutusan kapal perang ke laut hitam ini jelas menunjukkan kekuatan NATO di hadapan Rusia. Hal ini memicu kondisi psikologis Rusia untuk ikut campur dalam konflik separatis yang terjadi di Georgia. Rusia tidak mau dominasi nya sebagai negara superpower kalah. Kemudian, Rusia mempercayai, bahwa sebenarnya Georgia lah yang memulai perang ke Ossetia Selatan, sedangkan pihak Rusia hanya berusaha

⁷ "Hubungan Rusia&Georgia Sulit dipulihkan", news.okezone.com, diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

untuk membela warga sipil yang tinggal di daerah tersebut, yang sebagian besar merupakan keturunan Rusia⁸.

4.2 KEUNTUNGAN EKONOMI RUSIA PADA KONFLIK DI GEORGIA.

Konflik separatis di Georgia sudah tidak terelakkan lagi, Georgia memperoleh dukungan penuh dari Amerika Serikat, untuk melakukan intervensi penyerangan menuju terhadap kelompok-kelompok separatis di Ossetia Selatan. Serangan ini kemudian melahirkan perang terhadap Rusia yang terus membesar.

Sejarah Georgia sendiri merupakan negara yang di aneksasi oleh Rusia. Budaya yang dimiliki oleh Georgia sebagian besar diturunkan oleh Rusia. Bahkan sistem politik dan ekonomi yang diterapkan oleh Georgia benar benar mengikuti sistem yang dianut oleh seperti Rusia. Luas wilayah Georgia sebagian besar merupakan daerah pegunungan. Dengan letak geografis yang begitu strategis, Georgia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Populasi di Georgia berjumlah sekitar 4.661.473 jiwa. Jumlah populasi dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Georgia menjadikan Georgia harus berusaha begitu keras dalam mengolah kekayaan alamnya.

Dalam beberapa kurun waktu ini, Georgia berhasil menghasilkan produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, sebagian besar kekayaan alam yang diolahnya di ekspor ke negara lain. Kualitas ekspor yang di produk oleh Georgia memberikan potensi bagi Georgia untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain, untuk membuka pangsa pasar bagi produk-produk dalam negerinya.

Georgia termasuk ke dalam anggota CIS(The Common Welath Of Independence), CIS ini merupakan negara-negara persemakmuran bekas negara Uni Soviet. Sebelumnya Hubungan bilateral Georgia dan Rusia sangatlah erat. Dalam kurun waktu 25 tahun, Georgia dan Rusia bahkan terikat kesepakatan jual-beli migas. Hubungan ekonomi ini membuktikan

⁸ "Keterlibatan Rusia dalam konflik etnis Georgia", mhmdsyafuddin.blogspot.com, diakses pada tanggal 8 Mei 2016

bahwa sebenarnya, Georgia dan Rusia telah mempunyai ikatan kepercayaan yang cukup tinggi.

Rusia merupakan republik terbesar di Uni Soviet. Luas wilayah Rusia hampir dua pertiga dari wilayah Uni Soviet. Populasi Rusia berjumlah cukup besar yaitu 150 juta jiwa. Rusia banyak memberikan kontribusi secara ekonomi kepada Uni Soviet., dan menjadikan Rusia memiliki berbagai macam suku dan etnis.

Uni Soviet mengalami keruntuhan pada tahun 1991, hal ini berdampak kepada negara-negara yang terkabung di dalamnya. Negara-negara tersebut memutuskan untuk memerdekakan diri serta menjadi negara yang berdaulat. Setelah bubar, Rusia kemudian mewarisi sejumlah aset milik Uni Soviet. Akibat menurunnya kualitas ekonomi, dan kekuatan militer Rusia karena bersaing dengan NATO tersebut, menyebabkan berkurangnya kualitas Rusia sebagai negara superpower.

Sejumlah negara yang pernah bergabung dengan Uni Soviet dulunya, lama kelamaan membentuk sistem pemerintahannya sendiri. Mereka memilih untuk menjadi negara yang independen. Contohnya adalah, Ukraina, Kazakhstan, Uzbekistan, Latvia, Estonia, Belarusia, dan Georgia serta beberapa pecahan negara Uni Soviet lainnya.

Kedaulatan masing-masing negara ini, menyebabkan ikatan kebersamaan untuk membangun kerjasama seperti di masa lalu semakin berkurang. Karena masing-masing negara telah memikirkan kondisinya masing-masing.

Namun karena Uni Soviet merupakan negara yang kental mewarisi ideology Uni Soviet, membuat jiwa-jiwa komunisme serta semangat patriotisme Rusia melekat dengan sangat kuat pada diri Rusia, yang menyebabkan Rusia melakukan apapun untuk mempertahankan pengaruh terhadap negara-negara sekutunya untuk tujuan kepentingan nasionalnya. Mechel, produsen batubara Rusia melihat harga sahamnya anjlok 20 persen dan index pasar saham Rusia RTS turun lebih dari 5 persen. Ini akibat dari pernyataan PM Vladimir Putin beberapa

hari sebelumnya yang menuduh perusahaan ini tidak jujur dalam pembayaran pajak. Pasar saham di sanapun makin bergejolak karena sebelumnya persoalan yang dihadapi perusahaan minyak patungan TNK-BP telah memaksa CEO-nya meninggalkan Rusia. Para investor memilih posisi *wait and see*, memperhatikan dengan seksama perkembangan apa yang terjadi berikutnya.

Presiden Dmitri Medvedev berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa pasar saham Rusia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Beberapa hari kemudian, Medvedev kembali berusaha membesarkan hati kalangan bisnis Rusia dengan menyeru kepada pejabat dan badan-badan pemerintah untuk “berhenti melecehkan dunia usaha (*stop harassing businesses*)”.

Apa yang menarik dari peristiwa di atas? Bahwa pemerintah Rusia menuduh sebuah perusahaan besar melakukan kejahatan pajak bukanlah hal baru. ‘Kejahatan perpajakan’ adalah dalil ampuh untuk melumpuhkan perusahaan besar yang dinilai tidak patuh terhadap keinginan penguasa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Anti-Monopoli Federal (FAS) dan atau Kantor Pajak Federal (FNS) seringkali didasari oleh kepentingan politik penguasa. Putin, saat masih menjabat presiden, memanfaatkan antara lain lembaga-lembaga ini untuk membulatkan seluruh kekuasaan di tangannya.

Di satu sisi, perusahaan dan pengusaha besar (dikenal dengan sebutan *oligarch*) tidak jarang menggunakan kekuatan finansialnya untuk menjadi partisan dalam politik sehari-hari. Partisipasi *oligarch* dalam politik ini tidak selalu seiring dengan kepentingan penguasa. Di sisi lain, Presiden Putin, waktu itu, ingin memanfaatkan kekuatan *oligarch* untuk melayani kepentingan politiknya. Artinya, mereka yang bersebarangan jalan adalah lawan politik yang perlu dibuat patuh. Perusahaan dan *oligarch* yang tidak patuh bisa diharapkan untuk segera menerima kunjungan pemeriksaan oleh agen-agen kantor tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Putin seperti di atas bukan sesuatu yang mengejutkan. Namun bahwa Medvedev

memberikan pernyataan yang pro-bisnis sekaligus ‘menghimbau’ pejabat dan badan-badan pemerintah untuk menjaga diri dan tidak mengganggu kalangan bisnis, ini merupakan sesuatu yang menarik.

Serangan verbal Putin tentang Mechel dan pembelaan Medvedev terhadap kalangan bisnis memunculkan dugaan adanya ketidakharmonisan di balik hubungan Putin-Medvedev. Di sinilah letak daya tariknya karena Medvedev baru 3 bulan menduduki kursi kepresidenannya. Ia menjadi presiden karena ditunjuk oleh Putin (dan selanjutnya baru memenangkan pemilihan). Masa bulan madu telah usai? Putin yang menduduki kursi kepresidenan sejak 1 Januari 2000 merupakan kunci di balik kemakmuran dan kebangkitan Rusia pasca Uni Soviet. Putin dinilai memiliki karakteristik sebagai pemimpin yang kuat dan efektif dalam mewujudkan visi dan misinya. Penilaian ini tidaklah berlebihan mengingat tantangan yang dihadapi oleh Putin saat mulai menjabat.

Tantangan pertama adalah kondisi obyektif Rusia: memiliki luas lebih dari 1,5 kali luas wilayah AS, berpenduduk lebih dari 140 juta jiwa, lebih dari 100 bahasa yang dipakai oleh beragam etnik di dalamnya, serta memiliki 11 zona waktu. Artinya, rentang kendali yang dihadapi seorang pemimpin Rusia sangatlah panjang. Diperlukan tangan yang kuat untuk memegang kendali ini agar kehidupan berbangsa dan bernegaranya selalu terjaga.

Putin juga menghadapi tantangan berupa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan akibat krisis keuangan dan ekonomi yang bermula di Asia. Pada tahun 1999, misalnya, meskipun Rusia menikmati surplus dari penjualan minyaknya sebesar US\$ 29 milyar, namun rata-rata inflasi juga meningkat hingga 86persen. PDB bahkan turun 45persen dibanding tahun 1991, gaji rata-rata turun 30persen, sedangkan uang pensiun rata-rata turun 45persen. Dengan kondisi seperti itu, peran Rusia di panggung internasional merosot tajam. Salah satu kekuatannya yang tersisa adalah di bidang kemiliteran, khususnya ribuan hulu ledak nuklir yang masih tersimpan. Namun itupun tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya di era Uni

Soviet dulu, apalagi dibandingkan dengan kekuatan AS. Semuanya itu sudah aus termakan usia. Pemerintah Rusia tidak mampu membiayai riset dan modernisasi persenjataan strategisnya itu.

Kepresidenan Medvedev diawali dengan kondisi yang jauh lebih baik. Saat ini pemerintah Rusia memiliki cadangan devisa lebih dari US\$ 130 milyar. Rusia juga memiliki banyak milyarder, sekedar untuk menggambarkan secara sederhana kemakmuran rakyatnya saat ini. (Posting saya tanggal 2 Agustus 2008 “Rusia: Kemakmuran, Kemacetan, dan Ojek”.) Persoalannya, Medvedev dianggap hanya sebagai boneka Putin. Kepresidenannya dinilai lebih sebagai hasil penunjukan oleh Putin, meski ia kemudian memenangkan pemilihan dengan sekitar 70persen suara. Faktor Putin dalam kemenangannya di pemilihan presiden bulan Maret 2008 sangat besar karena Putin adalah presiden yang sangat populer dengan dukungan lebih dari 70 persen. Oleh karenanya, di luar negeri, dipilihnya Medvedev sebagai presiden oleh Putin dinilai capres Barrack Obama sebagai sebuah cara agar Putin dapat terus berkuasa, sedangkan capres John McCain menilai Putin (dengan cara itu) telah membuat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Di dalam negeri, sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 36persen responden menilai Putin berada di balik keputusan-keputusan penting yang dibuat Presiden Medvedev dan hanya 9persen yang percaya Medvedev benar-benar *in charge*.

Tampaknya saat ini Medvedev ingin membuktikan kepresidenannya. Langkah yang sangat tidak mudah. Ia adalah pemimpin Rusia pertama yang tidak pernah terlibat dalam struktur kekuasaan komunis Uni Soviet—dibanding Putin yang mantan agen dinas rahasia KGB. Artinya, Medvedev tidak cukup mengakar di tubuh lembaga-lembaga pemerintah Rusia, khususnya yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kekuasaan, seperti badan-badan intelijen dan kemiliteran. Meski Medvedev mempunyai kemiripan dengan Putin, yaitu berjiwa patriotik dan bervisi presiden harus memiliki posisi yang kuat *vis a vis* rakyatnya,

namun berbeda dengan Putin, Medvedev cenderung memilih pendekatan yang lebih terbuka bagi kompetisi dalam dunia bisnis dan luwes dalam hubungan internasional.

Tantangan terbesar yang dihadapi Medvedev untuk menjadi ‘presiden yang sesungguhnya’ adalah bahwa ia tidak memiliki dukungan kekuatan politik yang kuat untuk mengendalikan dan memimpin ‘beruang’ Rusia. Letak Geografis Georgia yang sangat dekat dengan Rusia, menjadikan hal tersebut sebagai alasan Rusia untuk mempertahankan Georgia sebagai sekutunya. Rusia menginginkan agar Georgia tetap menjadi sekutunya, sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan Rusia. Sebaliknya, ada kejadian yang merugikan bagi Rusia, yaitu terjadinya Revolusi Mawar.

Revolusi mawar ini terjadi, karena tindakan masyarakat Georgia yang melakukan aksi turun ke jalan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan Eduard Shevardnadze. Pemerintahan ini dinilai banyak melakukan tindakan korupsi, dan membuat pengangguran serta permasalahan-permasalahan lainnya seperti pengangguran tidak kunjung selesai, kemiskinan juga melanda rakyat Georgia pada masa pemerintahan ini. Aksi rakyat ini kemudian berhasil menggeser pemerintahan Eduard Shevardnadze, dan tidak menimbulkan pertumpahan darah. Kejadian ini disebut Revolusi mawar, berkat turunnya pemerintahan Eduard ini, Mikhail Saakashvilli mendapatkan banyak pujian dari rakyat Georgia. Dengan hal tersebut, Mikhail Saakashvilli pun diangkat menjadi presiden Georgia pada pemilu tahun 2004.

Namun kemenangan Mikhail ini dianggap Rusia karena mendapatkan dukungan dari pihak barat. Rusia sakit hati dan khawatir, serta merasa dikhianati oleh sekutu sendiri. Rusia merasa dirugikan dari kejatuhan Eduard Shevardnadze ini, karena dengan turunnya pemerintahan Eduard tersebut, berefek kepada perjanjian jual-beli migas antara Georgia dan Rusia yang telah disepakatai selama kurun waktu 25 tahun. Rusia merasa bahwa

pemerintahan Mikhail Saakashvilli menjadikan Georgia berkiblat ke barat dan cenderung menjadi anti Rusia.

Hal ini lah yang kemudian menjadi alasan Rusia untuk tidak lagi memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Georgia terhadap konflik separatis yang terjadi di Ossetia Selatan dan Abkhazia. Selain itu Georgia juga memilih untuk keluar dari CIS (The Common Wealth of Independence). Hal ini menyebabkan hubungan Rusia dan Georgia semakin tidak harmonis. Perubahan politik didalam suatu negara dapat menjadi suatu alasan dari pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara lain. Dalam kasus ini contohnya seperti Rusia dan Georgia, perubahan politik di Georgia, menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri yang diambil, dan melahirkan dampak domino akibat reaksi dari tindakan yang dilakukan oleh Rusia.

4.3 Mencegah Perluasan NATO

Sistem Politik dan ekonomi Georgia yang telah berubah kiblatnya ke arah barat, pada masa pemerintahan Mikhail Saakashvilli, membuat Rusia yakin bahwa sekutunya Georgia mulai mendukung blok barat. Hubungan kedua negara ini semakin bertambah buruk, ketika Georgia, mulai mengajukan diri ke dalam kelompok anggota NATO, dan Uni Eropa⁹. Georgia mengajukan Individual Partnership Action Plan (IPAP) kepada NATO. AS kemudian mengusulkan agar Georgia diterima menjadi anggota NATO sejak pengajuan diri Georgia, namun usulan Amerika tersebut belum sepenuhnya diterima oleh anggota NATO. Mereka bersikeras karena Georgia masih berkonflik dengan Rusia, dan masih berada dalam pengaruh Rusia.

⁹ "Kebijakan Pertahanan Rusia dan Dampaknya terhadap NATO.pdf, Rahyuni, Sri, core.ac.uk, diakses pada tanggal 1 Mei 2016

Usaha Georgia untuk menjadi anggota NATO juga dinilai tidak setengah-setengah, Georgia bersikeras untuk menjadi anggota NATO dengan turut serta aktif, menurunkan militer Georgia bersama NATO, yaitu kegiatan di Afghanistan dan misi nya di Irak. Tidak hanya menurunkan pasukan militernya bersama NATO, Georgia juga mulai memperluas demokrasi serta perbaikan institusional di dalam negerinya. Tindakan ini dilakukan oleh Georgia sebagai refleksi dari keinginannya untuk bergabung menjadi anggota NATO. Jika Georgia berhasil, maka Georgia akan diterima menjadi anggota NATO, karena telah memenuhi syarat yang diajukan oleh NATO.

Pengajuan diri Georgia yang begitu disambut hangat oleh Amerika Serikat, serta keseriusan Georgia dengan menjadi anggota NATO dan Uni Eropa, membuat Rusia khawatir, karena Rusia merasa, bahwa AS ingin mendominasi kekuatannya di Eropa Timur. Fase perang dingin antara Georgia dan Rusia pun dimulai.

Tidak mau kalah dengan Georgia yang telah memutuskan hubungan ekonomi lewat pembatalan perjanjian penjualan migas selama 25 tahun. Rusia juga menunjukkan pembalasannya dengan melancarkan aksi terror dan embargo terhadap Georgia di bidang transportasi¹⁰.

Dalam upaya untuk memperbaiki dan memperluas demokrasi sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota NATO, ada masalah yang cukup serius yang dialami oleh Georgia, yaitu Georgia haru menghadapi kelompok separatis, Ossetia Selatan yang ingin memisahkan diri dari Georgia. Pada sejarahnya, wilayah ini merupakan daerah di Kaukasia, yang terdiri dari Ossetia Utara yang terletak di Rusia dan Ossetia Selatan yang terletak di Georgia. Pada

¹⁰ ibid

tahun 1991, Georgia menghapus status otonom Ossetia Selatan. Namun hal ini mengakibatkan konflik, karena para nasionalis Ossetia Selatan ingin menyatukan daerahnya dengan Ossetia Utara. Kemudian pecah perang pada tahun 1992 antara Georgia dengan Rusia. Juni 1992, Eduard Shevardnadze dari Georgia, dan Boris Yeltsin dari Rusia, kemudian membentuk operasi penjaga keamanan di Ossetia Selatan. Kesepakatan ini berhasil mengurangi konflik antara Georgia dengan kelompok separatis Ossetia Selatan. Namun periode ini hanya berlangsung sampai pada pemerintahan kedua M saakashvilli.

Tanggal 5 Januari 2008, Mikhail Saakashvilli menjadi presiden Georgia kembali, dan hal ini memicu kelompok separatis tersebut untuk melancarkan kembali serangan ke Georgia. Serangan ini mendapatkan perhatian khusus dari Amerika Serikat. Pada tanggal 10 Juli 2008, Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice mengadakan pertemuan dengan Mikhail Saakashvilli di Tbilisi untuk menyampaikan dukungan kepada pemerintah Georgia mengenai masalah Ossetia Selatan dan Abkhazia¹¹.

Tanggal 7 Agustus 2008, Georgia meluncurkan operasi militer ke Tskhnvali ibu kota Ossetia Selatan sebagai balasan terhadap Ossetia Selatan di desa Georgia. Rusia yang bersekutu dengan Ossetia Selatan ini, membalas serangan ke Georgia. Perang pun berubah menjadi konflik antara Georgia, dengan Rusia. Sikap yang diambil oleh Rusia ini, semata-mata merupakan pengaplikasian dari kekecewaan Rusia, akibat keputusan politik ekonomi Georgia yang telah berubah kiblatnya menjadi pro barat. Juga sebagai ketakutan Rusia dalam kehilangan sekutunya, hingga Rusia akhirnya membantu Ossetia Selatan untuk membebaskan diri, karena secara politis Rusia merasa semakin kehilangan pengaruhnya.

¹¹ "Konflik Georgia dan Rusia dalam pembebasan Ossetia Selatan dari wilayah Georgia", www.academia.edu, diakses pada tanggal 4 Mei 2016,

Konflik ini kemudian berakhir dengan gencatan senjata, dimana di prakarsai oleh Perancis, karena melihat ketidakseimbangan dari kekuatan militer tersebut. Dengan konflik yang terjadi ini, pemerintah Georgia kemudian mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatic nya dengan Rusia. Keputusan ini juga diikuti oleh Pemerintah Rusia menutup kedutaannya di Tbilisi. Kebijakan yang diambil oleh negara ini, relevan dengan teori yang digunakan pada tinjauan pustaka tersebut¹².

4.4 Melindungi Etnis Rusia di Ossetia

Rusia dan Georgia adalah dua negara yang berbatasan secara langsung. Kedua negara ini mulanya merupakan bagian dari Union of Soviet Socialist Republic (USSR), atau yang lebih dikenal dengan nama Uni Soviet. Paska bubarnya Uni Soviet, Negara Georgia kemudian menyatakan kemerdekaannya terlebih dahulu pada tahun 1991¹³. Georgia dikenal dengan nama negara Kaukasus Selatan, bersama dengan Armenia, dan Azerbaijan.

Selama beberapa periode ini, sebenarnya Rusia begitu menjaga hubungan baik dengan Georgia, karena historical kedua negara ini yang dulu nya merupakan sama-sama menjadi satu kesatuan negara republic Uni Soviet. Kawasan Kaukasus dapat dikatakan merupakan sebuah kawasan yang dijaga keamanannya oleh Rusia. Rusia merasa bahwa negaranya wajib menjaga kesatuan dengan wilayah bagian selatan yang menjadi daerah perbatasan seperti, Dagestan, Chechnya, dan Ossetia Utara¹⁴.

Rusia juga menerapkan kebijakan luar negeri terhadap kawasan kawasan di sekitar seperti Georgia, Armenia dan Azerbian. Bagi Rusia, Kaukasus merupakan kawasan yang penting bagi Rusia. Setelah bubarnya Uni Soviet, Rusia yang menjadi ahli waris bagi Uni Soviet sekuat mungkin berusaha menjaga perdamaian dan kekompakan dengan negara-

¹² ibid

¹³ "Sejarah Rusia dan Georgia", www.cia.gov, diakses pada tanggal 2 Maret 2016

¹⁴ Ibid

negara bekas kesatuan Uni Soviet tersebut¹⁵. Kesatuan itu di aplikasikan dalam bentuk CIS (Commonwealth of Independent States). CIS ini merupakan kerjasama yang dijalin oleh negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Dibentuk pada tahun 1991, Georgia sendiri menjadi anggota CIS pada tahun 1991. Persatuan ini kemudian mengalami gangguan, dimana pada akhir tahun 1990-an, Georgia dengan Azerbaijan dan Uzbekistan, tidak menyetujui untuk memperbaharui keanggotaan mereka dalam CIS (Collective Security Treaty). Georgia bersikeras untuk mengganti pasukan Rusia yang telah ditempatkan di daerah perbatasan konflik dengan tentaranya sendiri. Belum lagi, Georgia kemudian membatalkan pendirian basis pertahanan pasukan Rusia dalam jangka panjang. Keputusan-keputusan Rusia ini telah membuktikan bahwa Georgia sebenarnya ingin membatasi jarak dengan Rusia.

Kenyataan ini yang kemudian melahirkan konflik berkepanjangan hingga saat ini. Republik Georgia merupakan sebuah negara di wilayah Transkaukasia, sebelah timur Laut Hitam. Di sebelah utara, Georgia berbatasan dengan Armenia dan Turki. Jumlah penduduk Georgia sekitar 4,2 juta jiwa, dengan luas wilayah sekitar 70.000 km² serta pusat pemerintahannya terletak di kota Tbilisi. Sejarah Georgia, berasal dari kerajaan Colchis dan Iberia pada abad ke-3 dan merupakan kerajaan yang mengadopsi agama Kristen pada abad ke-4. Saat terjadi Revolusi Rusia, Georgia kemudian menjadi negara yang berdaulat dengan berbentuk republik pada tahun 1918, namun pada tahun 1922 sampai pada tahun 1991, Georgia masih menjadi negara kesatuan Uni Soviet.

Mirip dengan keadaan negara-negara bekas komunis lainnya, Georgia mengalami krisis dan konflik internal paska kemerdekaannya, terutama di bagian wilayah Ossetia Selatan, Abkhazia, serta Ajaria. Pada tahun 2003, terjadi Revolusi Mawar, dimana menjatuhkan Presiden Eduard Shevardnadze dan digantikan oleh Mikhail Saakashvili yang membawa reformasi demokrasi, serta investasi asing dan pertumbuhan ekonomi yang tidak

¹⁵ "Georgia", news.bbc.uk, diakses pada tanggal 5 Maret 2016

juga membaik. Kemudian Presiden Saakashvilli menyatakan bahwa Georgia untuk bergabung ke dalam beberapa organisasi multilateral dalam memberikan perubahan posisi ke dalam negaranya di beberapa bidang¹⁶. Agustus 2008, Georgia kemudian melakukan perlawanan terhadap kelompok separatis di wilayah Ossetia Selatan, dan Abkhazia. Konflik tersebut melahirkan sebuah hasil dimana Rusia mengakui kedaulatan Ossetia Selatan dan Abkhazia, akan tetapi pengakuan ini kemudian diakui oleh beberapa negara saja, seperti Nauru, Nikaragua serta Venezuela. Pemerintah Georgia juga menyatakan bahwa Ossetia Selatan dan Abkhazia merupakan wilayah yang diduduki oleh Rusia.

Intervensi militer Rusia pada bulan Agustus 2008, dan menjadi suatu peristiwa yang baru, hal ini baru pertama kalinya dilakukan oleh Rusia, ketika mengirim pasukan untuk melakukan aksi militer diluar teritorinya, paska lepas dari Uni Soviet. Rusia memiliki motif terselubung di balik pengiriman pasukannya. Dalam konflik ini, peran Rusia dalam mencampuri konflik separatis di Georgia, menyita banyak perhatian masyarakat Internasional. Saat Uni Soviet pecah di tahun 1991, pecahannya tersebut menghasilkan 15 negara baru, diantaranya, Rusia, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Lithuania, Latvia, dan Estonia. Meskipun, Negara Uni Soviet telah terpecah belah, akan tetapi hingga saat ini, Rusia masih menyebut negara kesatuan bekas Uni Soviet tersebut dengan istilah Near Abroad, yang dimaksud Near Abroad disini adalah, bahwa Rusia mengakui kemerdekaan negara-negara tersebut, akan tetapi di satu sisi, Rusia menyadari bahwa negara-negara ini masih menjadi bagian dari dirinya, dan masih bergantung kepada negaranya. Rusia masih merasa menaungi

¹⁶ "Georgia South Ossetia, www.telegraph.co.uk, diakses pada tanggal 1 Mei 2016

negara negara tersebut, seperti hubungan dalam suatu hubungan pusat-daaerah yang telah berlangsung selama ratusan tahun¹⁷.

Meskipun pembubaran Uni Soviet telah berjalan dengan tenang dan tidak meninggalkan konflik, namun masalah sebenarnya terletak di negara-negara penerus, contohnya seperti Rusia, yang menjadi pewaris utama bagi Uni Soviet. Jika dilihat dari Etnis, Abkhazia, Ossetia Selatan, Georgia, sebenarnya sangat berbeda dari sejarah dan bahasa. Abkhazia masuk dalam kelompok bahasa Kaukasus Barat Laut, sedangkan bahasa Ossetia Selatan berasal dari Indo-Eropa Iran. Persamaan diantara keduanya adalah kedua budaya mereka berinteraksi secara langsung dengan etnis Georgia. Perbedaan inilah yang kemudian membuat Abkhazia ingin menjadi negara merdeka dan terlepas dari Georgia maupun Rusia. Sedangkan Ossetia Selatan selalu ingin menjadi negara merdeka seperti Abkhazia, namun juga ingin menggabungkan diri dengan Ossetia Utara yang berada di wilayah Rusia. Namun dilain pihak, ketika mereka memilih untuk bergabung dengan Ossetia Utara, maka dengan otomatis, mereka akan menjadi bagian dari Rusia¹⁸.

Ossetia Selatan, merupakan wilayah yang terletak di bagian utara Georgia serta terpisahkan dengan pegunungan Kaukasus dan Ossetia Utara yang sebenarnya masuk ke dalam teritori wilayah Rusia. Ossetia Selatan dihuni oleh etnis Ossetia yang secara etno-linguistik berbeda dengan etnis Georgia. Para pendahulu dengan pasti menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Ossetia telah menetap di wilayah tersebut sejak abad ke 5 masehi dan membentuk negara Ossetia dan bergabung dengan Rusia pada tahun 1774. Hal ini menjadi salah satu bukti antara Rusia dan Georgia, (dan Ossetia Selatan dan Georgia), karena rakyat Ossetia Selatan merasa lebih memiliki ikatan dengan Rusia ketimbang dengan Georgia. Konflik yang terjadi dengan negara-negara bekas kesatuan Uni Soviet adalah Georgia dan

¹⁷ Paul Reynold, "News Rusian World Order The Five Principle, news.bbc.co.uk, diakses pada tanggal 4 April 2016

¹⁸ "Bolshevik merupakan fraksi terbesar dalam Partai Pekerja Sosial-Demokrat Rusia (RSDRP) yang kemudian memisahkan diri menjadi suatu partai sendiri, pada bulan Agustus 1903. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia hal 130

Rusia. Georgia adalah wilayah yang berada di kawasan pegunungan Kaukasus ini menjadi bagian dari kekaisaran Rusia pada tahun 1801, dan paska Revolusi mengalami kemerdekaan yang singkat (1918-1921), sebelum diambil alih oleh pemerintahan Bolshevik dan menjadi kesatuan dari Uni Soviet pada tahun 1922.

Pada masa Uni Soviet, awalnya wilayah tersebut merupakan Republik Federasi Transkaukasia (bersama Armenia dan Azerbaijan), namun berpisah pada tahun 1936 yang kemudian menjadi Republik Sosialis Soviet Georgia. Selama berada di bawah pemerintahan Uni Soviet, Georgia memiliki status yang relative istimewa jika dibandingkan dengan wilayah Uni Soviet lainnya. Tingkat pendidikan dan standar hidup di Georgia relative lebih tinggi, selain itu Georgia juga relative lebih independen dibanding Moskow, dalam arti salah satu republic yang mampu mempertahankan identitas dan nasionalisme pada masa bersatunya Uni Soviet¹⁹. Pada tahun 1960 hingga akhir tahun 1970, kelompok nasionalis semakin banyak, dan semangat nasionalisme semakin di kobarkan. Pada bulan April 1978, sekitar 5000 mahasiswa melakukan unjuk rasa di Tbilisi dalam memprotes rencana pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi Georgia. Amandemen tersebut dibuat untuk menghapus peraturan bahwa bahasa Georgia merupakan bahasa resmi negara, dan menggantinya dan menjadikan bahasa Rusia, serta bahasa republic lainnya sebagai bahasa resmi pula²⁰.

Menghadapi protes ini, pemerintah Georgia yang dipimpin oleh mantan Menteri Dalam Negeri Eduard Shevardnadze akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Rencana ini menjadi perintis karena mengambil sebuah kebijakan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu tanpa Moskow.

Pada tahun 1987, Georgia kemudian menyiapkan persiapan kemerdekaannya, melalui kampanye promosi budaya, bahasa, serta identitas nasional Georgia.

¹⁹ Cornell, *Small Nations and Great Power*. Hal 340

²⁰ "Bertil Nygren, *The Rebuilding of Russia: Putin's Foreign Policy Toward the CIS*

4.4.1 Faktor Yang Mendasari Ossetia Selatan dan Abkhazia Memisahkan Diri Karena Hubungan Etnis Dan Sejarah Dengan Rusia.

Di sebelah utara, Ossetia Selatan berbatasan dengan Ossetia Utara yang masuk ke dalam teritori wilayah Rusia, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Georgia. Wilayah yang berada di selatan Kaukasia ini, mempunyai wilayah seluas 4000 kilometer persegi, dan ibu kotanya adalah Tskhinvali. Bahasa warga Ossetia sebenarnya adalah Persia, persis yang seperti digunakan di Iran. Bahasa kedua yang digunakan di Ossetia Selatan adalah, bahasa Rusia. Disinilah yang menarik bahwa sebagian besar rakyat atau penduduk yang menempati Ossetia Selatan adalah berkewarganegaraan Rusia²¹.

Sejak tahun 1989, konflik yang terjadi antara Georgia dengan Ossetia Selatan telah berlangsung karena rasa nasionalisme yang tinggi diantara keduanya. Meskipun sebelumnya, kedua etnis ini pernah hidup berdampingan secara damai, bahkan menunjukkan tingkat interaksi, dan pernikahan kedua nya yang sangat tinggi. Sebelumnya, saat Revolusi pada tahun 1917, Georgia berada di kekuasaan Menshevik yang berseberangan dengan kelompok Bolshevik di Moskow, Kelompok Menshevik ini melihat kondisi ini sebagai strategi untuk memanfaatkan kelompok Menshevik sebagai kemerdekaan Republik Demokratik Georgia pada tanggal 26 Mei 1918. Hal ini menyebabkan Georgia kemudian secara resmi menyatakan kedaulatannya dan memisahkan diri dengan Uni Soviet, akibatnya Ossetia Selatan berpisah secara legal dari saudara-saudara nya di Ossetia Utara.

Rakyat Ossetia Selatan merasa diperlakukan diskriminatif oleh Georgia, dan mengemukakan suaranya untuk bergabung dengan Ossetia Utara. Konflik etnis makin kerap terjadi, mulai tahun 1918, hingga 1921, dimana saat pemerintah Georgia menuduh etnis Ossetia bekerja sama dengan Rusia, dan pemberontakan ini juga terjadi karena Ossetia menginginkan kemerdekaannya. Rasa saling curiga diantara kedua belah pihak mulai berubah

²¹ "Georgia, Britanica Encyclopedia 2009

menjadi insiden-insiden perlawanan terhadap pemerintah, terjadilah perpecahan perang, di tahun 1920 rakyat Ossetia selatan yang didukung oleh pasukan Bolshevik dari Ossetia Utara melancarkan pemberontakan, namun pemberontakan ini berhasil dihentikan oleh tentara pemerintah Georgia.

Georgia mengirimkan tentara nasionalnya, pasukan Menshvik ke Tskhinvali (ibukota Ossetia Selatan), untuk menghentikan perpecahan atau perang tersebut. Konflik itu membuat 5000 etnis Ossetia meninggal, dan lebih dari 13.000 penduduk sipil mati karena kelaparan dan wabah penyakit. Sehingga pada tahun 1921, tentara Soviet menyerang Georgia, kemudian wilayah otonomi Ossetia Selatan, dimasukkan ke dalam Georgia. Konflik ini kemudian melahirkan rasa permusuhan yang berkepanjangan antara Ossetia Selatan dengan Georgia.

Menurut traktat yang menjadi dasar pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922, Ossetia Selatan mempunyai status sebagai wilayah otonom (autonomous oblast), namun masih berada di bawah administrasi Georgia. Keputusan ini sebenarnya tidak dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Rakyat Ossetia Selatan telah menuntut perlakuan yang sama dengan Ossetia Utara (yaitu untuk memperoleh status yang lebih tinggi yaitu autonomous republic, atau republic otonom), dilain sisi rakyat Georgia menganggap bahwa Ossetia Selatan merupakan hasil dari implementasi politik pecah belah yang dilakukan oleh Rusia terhadap Georgia. Dalam pemerintahan Uni Soviet, hubungan etnis Georgia dengan etnis Ossetia, tidak berjalan dengan baik, dan selalu timbul persaingan diantara keduanya. Etnis Georgia menganggap bahwa etnis Ossetia yang menetap di wilayah Ossetia Selatan, tidak seharusnya mendapatkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari bidang perekonomian, di lain sisi mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam bidang politik, jika dibandingkan dengan saudara mereka yang berada di wilayah Rusia (Ossetia Utara) dan penduduk di Abkhazia.

Sebuah gerakan yang disebut dengan Ademon Nykhas, dibentuk pada tahun 1988 demi menggalang persatuan rakyat untuk mencapai kemerdekaan di Ossetia Selatan. Gerakan ini meminta menaikkan status wilayah Ossetia Selatan menjadi otonomi Republik di dalam wilayah Georgia. Pada tanggal 10 November dewan kota SOAO (South Ossetia Autonomous Oblast), mengajukan permohonan untuk merubah statusnya menjadi otonomi republic, namun hal ini ditolak oleh Georgia.

Masalah lain yang timbul disini adalah, ketika pada tahun 1989 pemerintah Georgia, telah memutuskan untuk menetapkan bahasa Georgia menjadi bahasa resmi pemerintah di seluruh wilayah Georgia, dan tidak lagi menggunakan bahasa Rusia, dan hal ini seterusnya membuat etnis Ossetia beraksi, bahkan meminta bahasa Ossetia sebagai bahasa resmi di wilayah otonomi Ossetia Selatan.

Pihak ini telah beberapa kali mencoba untuk meredakan konflik dengan mengadakan forum umum yang dihadiri oleh kedua belah pihak, namun hasil dari pertemuan ini hanya menimbulkan konflik baru yang banyak menelan korban jiwa. Dimasa kepemimpinan Gorbachev, hubungan Georgia dengan Ossetia Selatan menghadapi masalah yang serius. Hal ini terbukti saat insiden yang terjadi pada tanggal 9 April 1989, dan memprovokasi gerakan nasionalisme Georgia, juga menyulut gerakan yang serupa yang terjadi di Ossetia Selatan.

Selama musim semi dan musim panas tahun 1989, Georgia dan Ossetia Selatan, terlibat konflik dalam sebuah perang undang-undang, yaitu saat Tblisi mengeluarkan peraturan untuk menetapkan bahasa Georgia, menjadi bahasa resmi di seluruh negara, dan Ossetia Selatan membalasnya dengan mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahasa Ossetia Selatan, menjadi bahasa resmi di wilayah tersebut. Konflik undang-undang ini telah mengakibatkan terjadinya konflik etnis yang menyebabkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Tanggal 10 November, secara sepihak Ossetia Selatan telah menyatakan bersatu dengan Ossetia Utara yang berada di wilayah Rusia. Besoknya, Georgia tidak mengakui sikap

Ossetia Selatan dan menyatakan bahwa Ossetia Selatan tersebut masih merupakan bagian dari administrasi Georgia. Konflik Georgia dan Ossetia Selatan kemudian terus berlangsung dan dimulai pada tanggal 23 November 1989. Di waktu tersebut, Gamsakhurdia bersama dengan Gumbaridze, memimpin 15.000 orang menuju Tskhinvali untuk menjalankan perundingan dalam melindungi etnis Georgia di Ossetia Selatan. Kelompok ini akhirnya ditahan di perbatasan Georgia dengan Ossetia Selatan dari gabungan rakyat dan milisi Ossetia serta satu resimen tentara Soviet untuk tidak masuk ke wilayah Ossetia Selatan. Insiden ini menimbulkan bentrok dan mengakibatkan 6 korban tewas, 24 luka ringan, dan 140 lainnya mendapatkan perawatan serius.

Semenjak tahun 1990, hubungan antara Georgia dengan Ossetia Selatan cenderung stabil karena para elit politik Georgia telah terlibat perselisihan akan masa depan negaranya. Namun pada bulan Agustus 1990, hubungan kedua negara tersebut kembali menegang, setelah parlemen Georgia mengadopsi peraturan baru, yang tidak memperbolehkan partisipasi partai daerah, dalam pemilu legislative yang dilangsungkan pada bulan oktober 1990.

Semenjak terpilihnya Gamsakhurdia menjadi parlemen Georgia pada pemilu bulan oktober 1990, hak-hak masyarakat etnis di Georgia di wilayah Ossetia Selatan terus diperjuangkan. Hal tersebut terjadi karena pemilih Gamsakhurdia sebagian besar berasal dari wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan.

Georgia melihat bahwa wilayah Ossetia Selatan, telah dimanfaatkan oleh Rusia untuk terus membuat keadaan tersebut menjadi tidak stabil. Meskipun sebenarnya kedua wilayah tersebut, ingin memisahkan diri dari Georgia, karena memang secara etnis berbeda dan menderita akibat penyatuan wilayah dengan Georgia tersebut. Karena merasa terdesak dengan keadaan ini, pihak Ossetia Selatan kemudian meminta dukungan dari Rusia, dimana mereka merasa sama secara etnis, dibandingkan dengan Georgia. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Georgia berfikir bahwa keberadaan kelompok separatis di Ossetia Selatan, selalu

mendapatkan dukungan dari Rusia, hal ini terbukti ketika kedua wilayah tersebut telah menetapkan bahasa Rusia menjadi bahasa utama yang digunakan.

Pada tanggal 9 Desember 1990, Ossetia Selatan kemudian mengadakan pemilu dengan tujuan untuk memilih anggota parlemen dari Republik baru ini. Dua hari kemudian, parlemen Republik Ossetia Selatan memilih untuk berada di dibawah pemerintahan Moskow. Ossetia Selatan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya dari Georgia, dan tindakan ini ditanggapi oleh Gamsakhurida dengan membatalkan hasil pemilu tanggal 9 Desember, dengan menghapus status autonomous oblast Ossetia Selatan dan menyatakan keadaan darurat di wilayah tersebut. Gamsakhurida kemudian memerintahkan Georgia-Ossetia Selatan, ketika ia memerintahkan pasukannya untuk menduduki Tskhinvali pada bulan Januari 1991. Pemerintah Georgia juga menetapkan keadaan darurat di wilayah tersebut, serta mengangkat komandan tentara dalam negeri Georgia untuk menjabat sebagai walikota Tskhinvali.

Sepanjang tahun 1991, Tskhinvali terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama dikuasai oleh pasukan Georgia, dan bagian kedua dikuasai oleh milisi Ossetia. Pasukan Georgia sebagian besar terdiri dari kelompok militer yang beranggotakan penduduk Ossetia beretnis Georgia, menggunakan meriam artileri untuk melakukan serangan Tskhinvali dan menyebabkan putusannya jalur komunikasi dan logistic.

Kedua pihak ini terlibat aksi aksi yang sadis terhadap penduduk sipil dari etnis lain, seperti pengusiran, penjarahan, dan pemerkosaan. Meski dugaan ini belum dapat dikatakan benar atau tidaknya, namun perang ini memang telah menciptakan kondisi yang mengenaskan dan sulit bagi kedua belah pihak. Sekitar 100.000 orang menjadi pengungsi, dan sebanyak 10.000 orang menjadi internally displaced persons (IDPs), karena perang ini. Bulan November pasukan Georgia kemudian mengepung Tskhinvali dan berhasil mengakhiri

perang ini secara total, dan mengakhiri perang secara tuntas, namun hal ini tertunda karena kerusuhan internal, yang melanda Georgia pada saat bersamaan.

Kerusuhan yang terjadi di Georgia disebabkan karena pemerintahan presiden Gamsakhurdia yang semakin otoriter, perpecahan yang terjadi antara Gamsakhurdia dengan sekutunya yaitu, Tengiz Kitovani, dan Jaba Ioselani. Ioselani dan Kitovani ini merupakan pemimpin militer yang banyak berperan dalam perang dengan Ossetia Selatan. Kitovani merupakan pemimpin Garda Nasional, dan Ioselani merupakan pemimpin pasukan dari satuan paramiliter Mkhedrioni (penunggang kuda) yang terkenal karena ketangguhannya.

Karena bergabungnya kedua pemimpin garda nasional ini, berhasil melumpuhkan pemerintahan Gamsakhurdia. Gamsakhurdia kemudian meninggalkan Georgia, dan melarikan diri ke Armenia pada tanggal 6 Januari 1992, untuk mendapatkan suaka politik dari presiden Djokhar Dudayev di Chechnya.

Tahun 1992, Georgia mengalami masa-masa yang sulit, bagi Georgia, terutama karena Georgia sudah tidak lagi berada di bawah Uni Soviet, Namun Georgia sedang mengalami masa-masa transisi. Konflik yang terjadi antara Georgia dan Ossetia Selatan sudah terjadi sejak tahun 1989, namun akhirnya Georgia berhasil mengendalikan semua konflik yang terjadi di negaranya.

Keadaan di wilayah Ossetia Selatan tahun 1993, hingga 2004 juga semakin stabil, tanpa konflik dengan pemerintah Georgia. Mikhail Saakhvili yang terpilih sebagai presiden Georgia pada tahun 2004, mempunyai program dalam mengambil wilayah kedaulatan Georgia yang dikuasai oleh pemberontak, seperti di wilayah Ossetia Selatan, Ajaria, serta Abkhazia. Pada bulan April dan Mei 1992, Intervensi Rusia semakin terbuka. Politisi-politisi garis keras seperti Ketua Parlemen Rusia, mengeluarkan pernyataan yang berisi kecaman keras terhadap tindakan Georgia dan penerimaan secara implisit terhadap keinginan Ossetia Selatan untuk bergabung dengan Rusia.

Melihat sejarah yang demikian, intinya jelas, bahwa konsep Irredentism untuk digunakan dalam kerangka berfikir teori ini. Ossetia Selatan ingin bergabung dengan Rusia, karena secara historical terkait erat dengan Rusia.